

17 Desember 2022

INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan, Kabupaten Bintan Masuk Kategori Sedang

Bintan – bintankab.bawaslu.go.id, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) telah resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jum'at (16/12/2022). Launching IKP dihadiri Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dan sejumlah pejabat tinggi setingkat eselon satu dari kementerian/lembaga. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan hasil pemetaan Bawaslu terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi tercatat pada wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau tercatat pada tingkat rawan sedang dengan skor 40.33, untuk Kabupaten Bintan tercatat pada tingkat rawan sedang dengan skor 38.19.

Berikut sejumlah isu yang harus menjadi perhatian bersama jelang Pemilu 2024:

1. Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
2. Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
3. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan
4. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.
5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.